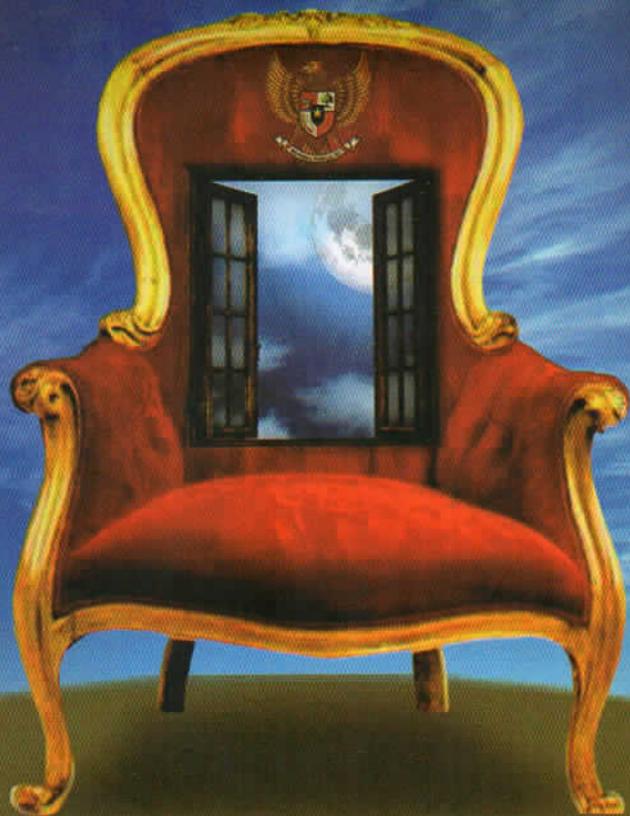


Dr. Zuly Qodir



# METODOLOGI POLITIK- PEMERINTAHAN:

Teori dan Perspektif Keindonesiaan



PUSTAKA PELAJAR

**B**uku yang ada di hadapan pembaca merupakan kajian yang lebih mengkhususkan pada teori dalam kajian politik-pemerintahan pasca Reformasi serta praktik-praktik demokrasi di Indonesia selama pasca reformasi (1998-2019) dengan pelbagai peristiwa yang terjadi. Banyak harapan sekaligus tantangan berat di dalamnya. Banyak orang yang optimis dengan perkembangan dan praktik demokrasi tetapi terdapat pula yang pesimistis karena banyaknya persoalan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pemilu yang diselenggarakan secara langsung oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Terdapat pula kecurangan-kecurangan dalam praktik demokrasi. Tetapi tidak sedikit pelajaran yang dapat kita ambil untuk memperbaiki sistem politik Indonesia dari tahun ke tahun. Prinsipnya tentu kita semuanya berharap praktik politik di Indonesia semakin baik. Demokrasi yang terjadi tidak mengarah pada demokrasi liberal, tetapi demokrasi yang menyejahterakan rakyat banyak bukan menyengsarakan rakyat karena banyaknya kecurangan, konflik kekerasan dan manipulasi suara.

Buku ini bertujuan melengkapi bacaan mahasiswa sosial-politik dan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mengambil mata kuliah penelitian sosial, politik, dan pemerintahan. Kepada para pengkaji, peminat dan peneliti bidang sosial politik-pemerintahan serta masyarakat umum buku ini saya dedikasikan.

ISBN 978-623-236-012-9



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar  
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167  
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083  
e-mail [pustakapelajar@yahoo.com](mailto:pustakapelajar@yahoo.com)  
website [pustakapelajar.co.id](http://pustakapelajar.co.id)

# DAFTAR ISI

**Pengantar Penulis ~ v**

**Daftar Isi ~ xi**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Memahami Politik-Pemerintahan ~ 3
  - B. Ideologi Politik Pemerintahan ~ 6
  - C. Teori Politik-Pemerintahan ~ 12
  - D. Ruang Lingkup Kajian Politik-Pemerintahan ~ 15
  - E. Mazhab Politik Pemerintahan ~ 18
  - F. Penutup ~ 23
- BACAAN LANJUTAN ~ 23

## **BAB II. EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI DAN AKSIOLOGI POLITIK PEMERINTAHAN**

- A. Ontologi Politik ~ 29
  - B. Epistemologi Politik ~ 32
  - C. Aksiologi Politik Pemerintahan ~ 38
  - D. Prinsip Etika Politik Pemerintahan ~ 43
  - E. Penutup ~ 48
- BACAAN LANJUTAN ~ 49

## **BAB III PRINSIP ETIK POLITIK PEMERINTAHAN : ETIKA DAN KESALEHAN**

- A. Amanah dan tanggung Jawab ~ 52
- B. Jujur dan Berintegritas ~ 55
- C. Tasamuh dan Taawun ~ 59
- D. Adil dan Musyawarah ~ 62
- E. Saling Menjaga Kebajikan dan Nahi Munkar ~ 67
- F. Saling Mengingatkan dan Memberi Nasehat ~ 70
- G. Kesederhanaan ~ 74
- H. Persaudaraan ~ 77

- I. Tawadhu, Tidak Angkuh ~ 79
- J. Penutup ~ 82
- BACAAN LANJUTAN ~ 83

**BAB IV MASALAH-MASALAH PENELITIAN POLITIK  
PEMERINTAHAN : KENEGARAAN-PEMERINTAHAN ~**

- A. Bentuk Negara : Monarchi Dan Demokrasi ~ 87
- B. Sistem Pemerintahan: Monarki dan Demokrasi ~ 92
- C. Ideologi Politik :Dari Konservatif Sampai Liberal ~ 97
- D. Sistem Politik : Otoriter Dan Demokratis ~ 102
- E. Partai Politik : Multy Party Dan Oligarkhi ~ 106
- F. Perwakilan Dan Pemilihan Umum ~ 112
- G. Legitimasi Politik Pemerintahan ~ 119
- H. Tanggung Jawab Sosial Negara ~ 121
- I. Perlawanan Dan Ketaatan ~ 125
- J. Penutup ~ 127
- BACAAN LANJUTAN ~ 127

**BAB V MASALAH-MASALAH PENELITIAN POLITIK  
PEMERINTAHAN : TATA KELOLA POLITIK -PEMERINTAHAN**

- A. Pelayanan Masyarakat : Cepat, Tepat, Efektif, Bersih Dan Efisien ~ 132
- B. Kinerja Pemerintahan : Berbasis Nilai, Instrumen Dan Evaluasi ~ 136
- C. Kebijakan Politik : Local Wisdom Dan Keberlanjutan ~ 139
- D. Kemiskinan Dan Pembangunan Daerah Tertinggal : Meningkatkan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat ~ 142
- E. Politik Anggaran Belanja Negara Dan Daerah : Tarik Ulur Pusat Dan Daerah ~ 148

- F. Penyakit Politik Pemerintahan : Bapakisme, Oligarki Dan Prmanisme ~ 153
  - G. Birokrasi Politik Dan Pemerintahan : Rational Choice, Charismatic Dan Paternastic ~ 156
  - H. Pemerintahan Yang Bersih : 7 Prinsip Good Governance ~ 162
  - I. Politik Uang, Korupsi Dan Nepotisme ~ 170
  - J. Penutup ~ 173
- BACAAN LANJUTAN ~ 174

## **BAB VI MASALAH-MASALAH PENELITIAN POLITIK PEMERINTAHAN : HUBUNGAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN**

- A. Budaya Politik Masyarakat ~ 178
  - B. Identitas Masyarakat ~ 184
  - C. Politik Identitas ~ 189
  - D. Populisme Islam ~ 193
  - E. Komunikasi Politik ~ 199
  - F. Kelompok Kepentingan ~ 202
  - G. Konflik Sosial ~ 206
  - H. Masyarakat Sipil ~ 212
  - I. Dinasti Politik ~ 217
  - J. Penutup ~ 220
- BACAAN LANJUTAN ~ 220

## **BAB VII PENUTUP / Refleksi Teoritik**

- A. Agenda Penelitian Lanjutan ~ 227

## **Daftar Pustaka ~ 231**

## **Tentang Penulis ~ 238**

## **Indeks ~ 239**

# **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar secara umum atas buku yang ada di tangan pembaca budiman. Persoalan politik-pemerintahan saat ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Bukan saja karena adanya departemen dalam negeri yang identic dengan pemerintahan, atau pun adanya eksekutif yang identic dengan kelompok orang yang menjalankan roda pemerintahan sebagai birokrat sehingga sering mendapatkan panggilan-ungkapan birokrat. Sifat dari birokrat sering identic dengan birokratis. Bahkan, bukan saja karena adanya dikotomi adanya pemerintahan dalam negeri dan luar negeri.

Politik-pemerintahan perlu mendapatkan perhatian kita semua. Hal ini disebabkan sebagai sebuah kajian keilmuan, politik-pemerintahan agaknya masih berada dalam “jurang” di antara ilmu-ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu sendiri. Tentu saja, buku ini tidak bermaksud menyatakan bahwa politik itu adalah pemerintahan. Demikian pula sebaliknya, pemerintahan adalah politik itu sendiri. Namun, buku ini hendak menegaskan bahwa politik dan pemerintahan merupakan bidang ilmu bahkan tindakan-praktek yang tidak dapat dipisahkan, sekalipun dapat dibedakan. Kita akan dengan mudah mendapatkan pelbagai penjelasan mengenai apa itu politik, ilmu politik, pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Namun agak sulit ditemukan sebuah penjelasan yang menempatkan keilmuan politik dan pemerintahan dalam sebuah rumpun keilmuan yang tidak terpisah secara kaku-tegas.

Beberapa konsep penting dalam tradisi politik dan pemerintahan akan menjadi bahasan secara ringkas dalam buku ini. Politik dan pemerintahan, jika kita perhatikan tidak akan pernah dapat dilepaskan dari konsep kunci yang bernama “kekuasaan”. Kekuasaan itu sendiri oleh sebagian ahli seperti Andrey Heywood (2014), menyebutkan sebuah upaya untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan, atau pun keinginan untuk melakukan sesuatu. Dalam kekuasaan mencakup hal-hal terkait dengan kemampuan seseorang untuk menjaga kehidupannya sendiri, sehingga kemampuan memerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik dilakukan.

Dalam politik-pemerintahan, kekuasaan biasanya dipahami sebagai suatu relasi atau hubungan, yakni kemampuan untuk memengaruhi perilaku seseorang atau orang lain dengan menggunakan cara yang bukan mereka sendiri inginkan, sehingga disebut sebagai “kemampuan untuk memengaruhi” orang lain. Secara lebih sederhana kekuasaan diartikan pula sebagai kemampuan untuk memberikan penghargaan atau hukuman, dan lebih dekat kepada makna kekuatan atau manipulasi yang kontras dengan makna “pengaruh”. (Heywood, 2014: 757). Pendek kata, kekuasaan dan kekuatan, manipulasi menjadi kata kunci dalam politik-pemerintahan yang akan kita bahas dalam buku ini.

Sedangkan pemerintahan (*governance*) yang juga dibedakan dengan pemerintah (*government*) memiliki kajiannya sendiri. Pemerintahan sendiri bermakna segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas. Dalam kajian Finer dalam Adisubrata (2002) istilah pemerintahan sekurang-kurangnya memiliki empat hal, yaitu: *pertama*, menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yang melaksanakan pengawasan atas pihak atau lembaga lain; *kedua*, menunjukkan permasalahan-permasalahan negara atau proses memilih terhadap masalah-masalah yang dijumpai; *ketiga*, menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas memerintah; dan keempat, menunjukkan cara-cara atau metode atau sistem yang digunakan untuk mengatur masyarakat.

*Government* lebih menunjukkan pada pelaku pemerintahan, seperti pejabat daerah dari yang terkecil tingkat dusun, desa, kecamatan dan seterusnya. Sementara *governance* lebih menunjuk pada adanya system yang mengatur atau dianut oleh para pelaku pemerintahan (birokrat). Jika sistemnya baik maka ada kemungkinan pelaku pemerintahan akan mengikutinya. Jika sistemnya jelek maka kemungkinan birokrat dibawahnya juga akan jelek. Disinilah system pemerintahan (*governance*) akan menjadi pijakan *government* yang akan menjalankan roda pemerintahan. Banyaknya kejadian korupsi di tingkat local, baik desa, kecamatan atau pun kabupaten/kota bisa saja karena system pemerintahan yang ada bukan system pemerintahan yang baik, transparan dan partsipatif sebagaimana prinsip *good governance*.

Oleh sebab itu, buku ini secara berturut-turut hendak memberikan penjelasan terkait hal-hal silang sengkabut antara politik dan pemerintahan itu sendiri. Juga hendak membahas hal-hal yang menjadi titik tekan dalam politik dan pemerintahan. Kita juga akan mendapatkan gambaran terkait ideology-idoelogi politik pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Selain itu buku ini juga hendak memberikan penjelasan terkait teori yang secara khusus membahas masalah teori, ruang lingkup serta aliran-aliran yang dianut dalam praktek politik-pemerintahan yang selama ini lazim kita kenal dalam kajian-kajian politik pemerintahan.

## **MEMAHAMI POLITIK-PEMERINTAHAN**

Aristoteles, Filosof (384-322 SM), memberikan penjelasan ringkas terkait politik-pemerintahan. Politik atau dalam Bahasa Yunani *polity* diterjemahkan sebuah masyarakat yang diorganisasikan melalui penyelenggaraan otoritas politik. *Polity* itu juga diartikan sebagai pemerintahan oleh banyak orang untuk kepentingan semua orang (banyak orang). Sementara otoritas dimaknai sebagai kekuasaan yang sah untuk memengaruhi orang lain karena memiliki hak. Sedangkan kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan memengaruhi pihak lain.

Aristoteles, dengan sederhana menterjemahkan politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang membicarakan dan menyelenggarakan

hal ikhwal yang terkait dengan kebijakan bersama seluruh anggota masyarakat (warga negara). Politik itu juga membedakan antara urusan pribadi (individual) dengan urusan masyarakat (public). Oleh karena itu, politik sebenarnya berkaitan dengan kabajikan untuk banyak orang dalam ranah kebijakan public, bukan kebijakan individual. Kebijakan menjadi kata kunci dalam urusan politik-kekuasaan. (Surbakti, 1992: 2)

Konsep politik yang berkaitan dengan kepentingan umum ternyata tidak semudah untuk diimplementasikan. Bahkan, sebagian ilmuwan mempersoalkan apa yang dikatakan dengan kepentingan umum. Sebagian menterjemahkan kepentingan umum merupakan tujuan moral atau nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kabajikan, kebahagiaan, dan kebenaran. Sebagian lainnya menyatakan bahwa kepentingan umum adalah keinginan orang banyak dan kumpulan orang. Samuel Huntington, menyebut bahwa kepentingan umum adalah kepentingan pemerintah, sebab lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kabajikan bersama. (Surbakti, 1992: 3)

Dalam politik terdapat apa yang dinamakan etika dan tujuan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, berpolitik itu membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar secara bersama. Inilah aspek etik filosofis dari politik yang dikembangkan dalam tradisi para filosof dan ahli etika, sehingga politik itu terkait dengan norma dan tujuan-tujuan spekulatif, bukan sekadar empirisme dan realisme. Filosof seperti Plato, Aristoteles, John Stuart Mill, dan Socrates telah menterjemahkan politik dalam kajian etik. (Surbakti, 1992: 3)

Politik juga berkaitan dengan persoalan persaingan (kontestasi) antar kelompok dalam masyarakat. Bagi pemenangnya dibolehkan mempergunakan otoritasnya untuk memaksakan pendapatnya agar mensukseskan pandangannya sebagai bagian dari monopoli. Inilah politik yang merupakan persaingan memperebutkan kekuasaan untuk saling memengaruhi antar kelompok, antar negara, antar manusia dan

masyarakat dalam sebuah negara. Inilah sebenarnya yang menyebabkan perlu adanya pemegang otoritas politik dalam negara atau masyarakat agar terjadi pembagian kekuasaan. (Surbakti, 1992: 4)

Otoritas politik karena itu didasarkan pada sebuah tugas yang diakui untuk dipatuhi dan bukan setiap bentuk kekuasaan atau manipulasi. Oleh sebab itu, otoritas adalah kekuasaan yang dibungkus (diberi kekuatan) pengakuan-legitimasi atau hak untuk berkuasa. Otoritas itu sendiri menurut Max Weber dibedakan menjadi tiga hal, yakni otoritas tradisional karena berdasarkan sejarah, otoritas karismatik berdasarkan kualitas pribadi dan otoritas legal-rasional yakni didasarkan pada serangkaian aturan non personal (impersonal). Max Weber menjadi salah satu tokoh yang banyak membahas soal kekuasaan dan birokrasi. (Heywood, 2014: 8)

Politik itu sendiri dikatakan sebagai seni memimpin (masyarakat). Politik dengan demikian akan berhubungan dengan orang lain dan kepemimpinan yang dijalankan. Dalam kepemimpinan terdapat pula model kepemimpinan, seperti kepemimpinan otoriter (yang mengandalkan) dirinya sendiri sebagai rezim politik. Ada pula pemimpin demokratis mendasarkan pada partisipasi public dalam memimpin. Terdapat pula pemimpin transformative yakni memberikan ruang untuk saling bertukar pikiran, memberi dan menerima serta memikirkan masa depan sebuah bangsa (masyarakat) ketimbang menimbang masa lalu. Masa lalu hanya dijadikan pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. (Sartono Kartodirjo, 2000)

Dari tiga model pemimpin masyarakat masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Untuk sebuah negara yang baru berdiri seringkali dibutuhkan pemimpin otoriter dan karismatik. Sementara jika negara telah bertahun-tahun berdiri maka dibutuhkan pemimpin demokratis agar masyarakat saling berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan memajukan bangsa. Sedangkan untuk masa depan sebuah bangsa dibutuhkan pemimpin transformative karena membutuhkan

keberlanjutan kepemimpinan. Tiga model pemimpin ini akan mewarnai bagaimana masyarakat bangsa akan dibangun dan dikembangkan karena masing-masing memiliki karakternya sendiri.

Dalam kaitannya dengan model kepemimpinan tersebut, Max Weber, sosiolog asal Jerman memberikan beberapa penjelasan menarik terkait kepemimpinan (negara); dalam tiga bagian penting: pertama, beberapa unsur negara seperti jabatan, peranan, lembaga-lembaga semuanya memiliki tugas jabatan yang jelas, bersifat kompleks, formal dan permanen; kedua, kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final dan mengikat seluruh warga negara. Para pejabat memiliki hak untuk menegakkan keputusan tersebut seperti menjatuhkan hukuman dan menanggalkan hak milik. Dalam hal untuk melaksanakan kewenangan maka negara menggunakan aparatnya, seperti polisi, militer, jaksa, hakim dan petugas lembaga masyarakat; dan ketiga, kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut. (Weber, 1962: 12)

Beberapa penjelasan mengenai kekuasaan di atas menjadi salah satu dasar untuk memahami kaitan antara politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan menjadi bagian yang dapat dikatakan tak terpisahkan dalam sebuah negara. Politik sekalipun dapat dilihat sebagai kegiatan mencari mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat tampaknya membutuhkan hakikat atau makna, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimana pun keberadaannya. Oleh sebab hal ini merupakan suatu yang bisa dikatakan tidak bisa dihindarkan.

## **IDEOLOGI POLITIK PEMERINTAHAN**

Dalam pergulatan politik dunia, terdapat pelbagai macam polihan ideology politik sebuah negara. Terdapat negara yang menganut ideology fasisme, kanan, namun juga ada yang menganut fasisme kiri. Italy dan Jerman pernah menganut system fasis semacam ini. sementara itu, di

belahan dunia lainnya terdapat pula yang menganut paham politik Komunis (yang belakangan) mengalami kebangkrutan secara massal di dunia kontemporer. Russia, Cuba, Vietnam dan China adalah negara-negara yang pernah menganut system politik-pemerintahan sosialis-komunis. Selain itu, terdapat negara-negara yang menganut system politik-pemerintahan demokrasi bahkan demokrasi liberal seperti Amerika, Prancis, Canada, Swedia, Australia, Mesir, Indonesia dan Pilipina.

Selain dari negara-negara tersebut, beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Thailand, Jepang, Arab Saudi, Brunei Darussalam menganut system politik-pemerintahan kerajaan-kesultanan. Negara-negara ini memiliki seorang Raja/ratu sekaligus memiliki seorang perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan perdana Menteri/Sultan menjadi kepala negara dan kebudayaan negara. Di antara negara tersebut memiliki perbedaan mekanisme pemilihan dan kekuasaan politik yang diatur oleh masing-masing konstitusi. Negara lain sebenarnya tidak dapat mengatur, namun dalam kenyataannya, seringkali negara lain “hadir” di sana dan ingin turut serta mengatur sehingga terjadi konflik di dalam negara.

Beberapa negara yang menerapkan ideology politik-pemerintahan jika dilacak dapat ditemukan masing-masing negara memiliki basis social yang beragam. Basis social menjadi salah satu instrument penting dalam menentukan pilihan ideology politik-pemerintahan suatu negara. Negara-negara fasis cenderung memiliki basis social masyarakat pekerja keras dan pekerja kasar, selain masyarakat urban yang saling berebut ruang public pekerjaan. Hal ini dikemukakan oleh Seymour Martin Lipset (1960), ketika membahas beberapa ideology politik yang berkembang di dunia seperti fasisme kanan, kiri, liberal, serta komunisme. Ketika itu, negara fasis kanan seperti Uni-Soviet sebelum hancur dengan glassnot dan perestrika Michael Gorbacev (1988), serta fasisme Jerman era Nazi dan fasisme Italy era Benedito Musolini, Dinasti Ming di China dan fasisme Jepang.

Negara-negara demokrasi seperti Amerika, Prancis, Filipina dan Indonesia memiliki basis social yang juga beragam. Bahkan Prancis sebagai negara yang cenderung liberal dan secular memiliki basis social masyarakat yang sangat menghargai dan tunduk pada kebebasan individu. Persoalan individu menjuadi hak otoritatif warga masyarakat, negara tidak dapat menganturnya, dan masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas individual seperti ritual di ruang public (negara). Di Prancis agak sulit kita temukan adanya upacara atau praktek ritual di ruang-ruang public (pemerintahan) sebab hal itu dianggap menjadi bagian hak personal yang tidak perlu dibawa dibawa ke ruang public. Prancis merupakan tipikal masyarakat eropa yang sangat liberal sebagaimana semboyan yang dianut yakni *liberte* dan *fraternete*.

Sementara itu, Amerika, sebagai salah satu negara yang menganut ideology demokrasi, memiliki basis social masyarakat yang berbeda dengan Prancis. Masyarakat Amerika tidak permisif seperti di Prancis dalam hak individual, sekalipun hak-hak individual sangat dihargai oleh undang-undang. Masyarakat Amerika masih mentolerir hal-hal yang sifatnya individual dalam hal keagamaan, keluarga maupun etnis. Memang terhadap etnis dan ras kulit hitam sebagian masih memperlakukannya dengan rasis, namun negara melarang konstitusi berlaku rasis atas mereka kulit hitam. Bukti atas demokrasi Amerika adalah terpilihnya presiden keturunan berkulit Hitam John F. Kennedy, Thomas Jeferson dan Barack Obama.

Sementara Indonesia dan Filipina memiliki basis social masyarakat yang hampir sama yakni kelas menengah ke bawah (rakyat kebanyakan) dan pekerja rendahan, sehingga memberikan ruang yang sama pada mereka yang berada di level bawah, menengah dan atas untuk sebuah kebijakan politik. Menjadi kandidat Legislatif, hakim, bahkan presiden misalnya, di Indonesia maupun Filipina sama-sama memberikan kebebasan pada semua lapisan masyarakat yang menjadi basis sosialnya. Indonesia dan Filipina dapat dikatakan sebagai salah satu contoh negara

yang menganut demokrasi dengan basis social keagamaan cukup kuat. Di Indonesia mayoritas penganut Islam. Sedangkan di Pilipina mayoritas penganut Katolik. Kedua negara ini menganut system dan ideology politik demokrasi.

Analisis basis masyarakat untuk memahami ideology politik, apakah kiri-kanan-komunis-kiri-fasis dan demokrasi dapat dilacak sejak terjadinya Revolusi Prancis abad ke-18. Saat ini para ahli dari pelbagai negara mengadakan pertemuan-konperensi untuk membicarakan tentang ideology politik-pemerintahan sebuah negara, lalu di antara mereka saling mengemukakan pandangannya dari latar belakang basis social mereka. Dari sana muncullah kategorisasi social *egalitarianism*, *populisme* ekstrem, fasisme kelas bawah dan otoritarianisme ultra kanan dan kiri sehingga terjadilah perdebatan yang sangat keras di antara mereka untuk saling mempertahankan pendapatnya serta menerima pandangan orang lain. (Lipset, 1960: 81)

Memperhatikan basis social politik-pemerintahan yang dibangun oleh para ilmuwan dan dipraktekkan di masa kepemimpinannya, kita dapat memperhatikan saat ini dan agaknya sampai ke depan, terkait adanya karakteristik yang beragam dari pelbagai negara yang menerapkan ideology politiknya. Semua ini dalam perspektif sosiologi politik dan gerakan politik dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan politik yang alami dan sifatnya di dasarkan pada ciri-ciri khusus negara dengan basis social yang beragam pula. Ada ancaman dan tantangan di masing-masing negara seperti federalism, ekstremisme, dan konservatisme namun semuanya akan menjadi pertanda bahwa dalam sebuah negara yang beragam tidak bisa memaksakan untuk menerapkan sebuah ideology politik yang berbeda dengan basis sosialnya.

Masing-masing gerakan politik jika kita perhatikan, kaum ekstremis-kanan misalnya, dalam beberapa negara memiliki ciri khas yang sama di beberapa negara yakni hendak merubah Sistem dan ideology politik yang dianut dalam sebuah negara. Mereka hendak memaksakan

kepada setiap orang akan pemahaman politik dan ideologinya, sehingga yang berbeda akan dianggap sebagai musuh dan lawan politiknya. Mereka akan mengobrak-abrik system ekonomi, budaya, dan politiknya sesuai dengan kehendak idoeologi yang dipahami. Sebenarnya gerakan ekstremis-kanan ini tidak berbeda jauh dengan gerakan konservatif dan fasis ekstrem yang sama-sama berkehendak merubah system politik dalam sebuah negara dengan model yang revolusioner, kadang dengan menggunakan model kekerasan. Oleh sebab itu, baik gerakan-gerakan politik ekstrem – kanan maupun konservatif kiri dan fasisme ekstrem sama-sama berbahaya untuk sebuah negara beragam.

Pelbagai ideology politik kontemporer yang masih berlanjut antara lain demokrasi, liberal, sosialis, belakangan muncul feminis, envioremental, konservatif dan radikalisme. Beberapa ideology politik-pemerintahan disini tidak akan saya bahas satu persatu. Dalam bagian ini hanya hendak ditunjukkan bahwa ideology politik pemerintahan merupakan suatu yang penting dalam kajian politik-pemerintahan, sejak dari zaman klasik sampai modern saat ini. oleh sebab perlu mendapatkan perhatian dan akan terus menjadi perhatian para ilmuwan politik, ilmuwan social (sosiolog), antropolog ataupun ekonom dan ahli hukum. (Eatwell, 2001)

Istilah ideology dalam politik-pemerintahan belum ada kesepakatan di antara para ahli ideology. (Ian Adams, 2004). Namun begitu, sebagai suatu batasan umum, ideology sekurang-kurangnya memiliki beberapa kriteria sehingga suatu gagasan-pemikiran dikatakan sebagai ideology politik-pemerintahan. Hal-hal tersebut antara lain: *Pertama*, adanya pelembagaan gagasan secara istematis yang diartikulasikan oleh sekelompok masyarakat. Soal ideology partai misalnya, jika kita sedang membahas partai democrat, partai buruh, kongres atau bahkan partai Islam, maka kita sebenarnya sedang membahas pandangan hidup, idealitas, visi, misi dan praktek politik,

## DAFTAR PUSTAKA

- John Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Disain Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2014
- Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Third Edition), Sage Publication London and New Delhi, 2005
- Madison, GB, *The Hermeneutics of Post-Modernism*, Bloomington: Indiana University Press, 1988
- JJJ. M. Wuisman, M. Hisyam (penyunting), *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Prenada, Jakarta, 2007
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, 2015
- Mats Alvesson and Kaj Skoldberg, *Reflexive Methodology : New Vistas for Qualitative Research*, Sage Publications, 2000
- Andrew Heywood, *political theory : an introduction*, 2009
- Andrew Heywood, *Politics*, 2012
- Arief Budiman, *Teori Negara*, Gramedia, 2001
- Alexis de Toquvielle, *Negara, Masyarakat dan Demokrasi*, Obor, 2009
- Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*, 2015
- Vedi R hadiz, *A New Islamic Populism and the Contradiction of Development*, Routledge, 2012
- Vedi R hadiz, *Between Dissent and Power*, IJRO, UK, 2014
- Vedi R hadiz and Richard Robisson, *Power and Reorganising Local Politics*, Oxford, 2009
- Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Bambu-LKiS, 2015
- Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara*, Gramedia, 2002

Jeremi Menchick, *Islam and Democracy in Indonesia : Tolerance without Liberalism*, Oxford, 2014

Sunyoto Usman, *Modal Sosial*, 2018

Mohammad AS Hikam, *Deradikalisasi*, Gramedia, 2015

Hamim Ilyas, *Fikih Akbar*, Alvabet, 2018

Jan Willem Projien (ed), *Power, Politics and Paranoia*, Cambridge, 2012

Donnatella Della Porta, *Methodological Practices in Social Movement Research*, Oxford, 2012

Franz Magnis-Susesno, *Etika Politik*, Gramedia, 1992

Haryatmoko, *Etika Publik*, Gramedia, 2012

Francis Fukuyama, *Trust*, Qalam, 2005

John Creswell, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, 2014

John Creswell, *Disain Riset*, Pustaka Pelajar, 2015

Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, YOI, 2010

John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, 2008

Bassam Tibi, *Islamic Revivalism*, Oxford, 2009

Bassam Tibi, *Islam, Islamism and Politics*, Oxford, 2012

Armando Salvatore, *Public Islam and the Common God*, Brill, Boston, 2006

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Kemanusiaan*, Mizan, 2010

Yudi Latief, *Negara Paripurna*, Gramedia, 2010

Yudi Latief, *Mata Air Keteladanan*, Mizan, 2012

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, 1992

Verma, SP, *Teori Politik Modern*, Rajawali Press, 1995

- Lipset, Seymour Martin , *Political Man*, Pustaka Pelajar, 2001
- Ian Adams, Ian, *Political Ideology Today* (1993), edisi Indonesia, *Ideology Politik Mutakhir*, Qalam, 2004
- Eatwell, Roger and Anthony Wright (ed), *Contemporary ideologies Continuum*, New York, 2001
- Apter, E David, *Introduction to Political Analysis*, 1977
- Budiarjo, Miriam, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, 2010
- Gaus, Gerald L and Chandran Kulathas, *Hanbook of Political Theory*, London, Sage, 2004
- Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, 2016
- Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik*, Gramedia, 2011
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta 2003
- Francis Fukuyama, Trust ; Kabjikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Qalam, 2002
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, 1990
- Armando Salvatore and Dale Eckelman, Brill, *Public Islam and the Common Good*, Nederland, Leiden, 2006
- Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, Obor dan Freedom Institute, Jakarta, 2006
- M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Paramadina, 1992
- Herman Khaeron, *Etika Politik*, Nuansa Cendekia, 2013
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mibah, volume 15 (Juz-Ama)*, Lentera, 2000
- Maszlee Malik, *Foundations of Islamic Governance*, Routlage, London, 2017
- Hans Kung, *Islam Past, Present adan Future*, Oxford, 2007
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik ; Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Gramedia, 1994
- Francis Fukuyama, *The End History and the Lasman*, 1992

- Francis Fukuyama, *State Building : Governance and World order in the 21-Century* (2004), diterjemahkan menjadi *Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad-21* (2005)
- Donald Horowitz, *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*, Cambridge, 2013
- Kenichi Ohmae, *The End of Nation State : The Rise of Regional Economy*, 1995
- Summer b Twiss, Marian Gh Simion and Rodeny I Petersen (ed), *Religion and Public Policy, Human Rigts, Conflict and Ethics*, Cambridge Press, 2009
- Will Kymlicka, *Filsafat Politik Kontemporer*, Pustaka Pelajar, 2004
- Kishore Mahbubani, *Asia Hemisfer Baru Dunia*, Kompas-Gramedia, 2008
- Zuly Qodir, Achmad Nurmandi dan M. Yamin, *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, Pascasarjana UMY-Pustaka Pelajar, 2014
- Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, 1996
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 2008
- Jean Gelman Tylor, *Global Indonesia*, Routledge Southeastasia Series, 2013
- Asef Bayat, *Islam and Democracy : What is the Real Question?* Amsterdam University, 2007
- Shireen T Hunter and Huma Malik, *Modernization, Democracy and Islam*, CSIS, 2005
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, 2010
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 2006
- James Scott, *Art Domintaion*, Yale University, 1988
- Joel S Miqdal, *Strong Society and Weak State*, Yale University, 1988
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, Paramadina, 1998
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan*, Tiara Wacana, 2000

- Roger Eatwell dan Anthony Wright (ed), *Ideologi Politik Kontemporer*, Jendela, 1998
- Vedy R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan pasca Orde Baru*, LP3ES, 2008
- Jeremy Menchik, *Islam and Democracy : Tolerance without Liberalism*, Cambridge University Press, 2016
- Henk-Schulte Nordhot and Garry van Klinken, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, Leiden, KITLV, 2007
- Asimina Christoforou and Michael Laine, *Re-Thinking Economics : Exploring the work of Pierre Bourdieu*, Routledge, 2014
- Wei-Jun Jean Yeung and Mui Teng Yap (eds), *Economic Stress, Human Capital, and Families in Asia*, Springer, 2013
- J. Mardimin, *Politik Lokal, Dukun dan Duit*, Forsa Salatiga, 2006
- Jan Willem van Prooijen and Paula m van lange, *Power, Politics and Paranoia*, Cambridge, 2014
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, 1992
- Teten Masduki, *Korupsi dan demokrasi di Indonesia*, ICW, 2007
- Nils bubandt, *Democracy, Corruption and The Politics of Spirit in Contemporary Indonesia*, Routledge, 2013
- Donal Horowitz, *Constitutional Democracy and Change in Indonesia*, Cambridge, 2013
- David Griffin, 2016, *Development in e-Government: a critical Analysis*. IOS. UK
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption*, 2001
- Edward Aspinal, *Democracy for Sale*, NUS, 2019
- Ahmad Suaedy, *Premanisme Politik*, ISAI, 1999
- Ari-Veiko Anttiroiko, *Innovation in Public Governance*, IOS Press, 2011
- Richard S Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Nusa Media Bandung, 2014
- Jo Anne Schneider, *Social capital and Welfare Reform*, Columbia University Press, 2006

Andrew Heywood, *Politics*, 2014

Wil A H. Thissen, Warren E Walker (eds), *Public Policy Analysis: New Developments*, Springer 2007

Adolfo Figueroa, *Growth, Employment, Inequality and Environment*, Pilgrave McMillan, 2015

Jeff Heykens (ed), *Religions and Politics*, Routledge, 2011

Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten*, Pustaka Jaya, 1988

Seyyed Husein Alatas, *Mitos Pribumi Malas*, LP3ES, 1987

Nancy Duxbury, WF. Garrett-Petts and David Maclennan, *Cultural Mapping as Cultural Inquiry*, Routledge, 2015

Clifford Geertz, *Santri, Abangan, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jembatan 1958

Lawrence E Harrison and Samuel P Huntington, *Kebangkitan Peran Budaya : Bagaimana Nilai-Nilai membentuk Kemajuan Manusia*, LP3ES, 2005

Benedict ROG. Anderson, *Kuasa Kata : Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*, Mata Bangsa 2000/Cornel University Press, 1990

Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten*, Jembatan 1988

Kuntowijoyo, *Madura 1900-1942*, Hasta Mitra 2001

Andrew Heywood, *Politics*, Pinguin Book, 2014, terjemahan *Politik*, Pustaka Pelajar, (2016)

Michael Rush dan Phillip Athoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali, 2005

Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, *Social Conflict, Escalation, Stalement and Settlement*, 1986, New York, State University, terjemahan Pustaka Pelajar, 2009.

Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Prenada Media Group, 2010

How Won Jeong, 2000, *Peace and Conflict Studies*, IPRA

- How- Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, Sage 2008
- Vedi R hadiz, *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia pasca Soeharto*, LP3ES, 2005
- Chadwick F Ager, *Peace Research and Peace Building*, Springer, 2014
- Daniel J Christie, (ed) *Peace, Conflict and Violence*, Printil Hall, USA, 2011
- R Scott Appleby, *The Oxford Hanbook of Religion, Conflict and Peace Building*, 2015
- Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, 1996
- Alexis de Tocqueville, *Tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat Sipil*, Obor dan Freedom Institute, 2000
- Willy Kimlicka, *Masyarakat Multikultur*, LP3ES, 1999
- Abdul Azis Sachedina, *Beda Tetapi Setara*, Serambi, 1996
- Leo Agustino, *Politik di Dinasti di Indonesia*, LP3ES, 2014